

## **BAB II**

### **PROFIL POLITIK LUAR NEGERI NEOIMPERIALIS AMERIKA SERIKAT**

Bab II ini akan membahas tentang profil politik luar negeri neoimperialis Amerika Serikat sebagai perwujudan atas kepentingan nasionalnya, meliputi prinsip-prinsip dasar, kemudian secara spesifik bagaimana bentuk-bentuk kebijakan Amerika Serikat dalam menjalankan Politik Luar Negeri neoimperialis, selanjutnya manifestasi politik neoimperialisme Amerika Serikat secara khusus di Uzbekistan dan kawasan Asia Tengah.

Secara umum, sifat Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang imperialis sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya Doktrin Monroe yang meliputi karakteristik isolasionisme serta ekspansionisme, dan bahkan hingga pada karakteristik yang tengah diterapkan saat ini, yakni moralisme dan realisme. Doktrin ini membawa Amerika terhindar dari kolonialisme Eropa pada saat itu hingga kemudian dengan sifat ekspansionisnya menjadi negara hegemoni di bumi belahan bagian Barat. Keberhasilan atas penguasaannya ke negara lain di belahan bumi bagian barat lantas tidak membuat Amerika berhenti sampai di situ saja, melainkan melebarkan skala kekuatannya ke belahan bumi yang lain.

Seiring dengan dinamika politiknya, sejak era kolonialisme, kemudian setelah dinyatakan bahwa ancaman yang dihadapi tidak lagi komunisme melainkan Islam, Amerika Serikat terus melanjutkan arah kebijakan luar negerinya dengan cara-cara yang semakin kompleks. Di tengah bayang-bayang atas perang melawan terorisme orde Bush, muncul beberapa gagasan terkini yang dahsyat tentang strategi dan penataan ulang dunia unipolar saat ini. Ide-ide ini mengemukakan penggunaan kekuatan unilateral Amerika Serikat yang sifatnya mencegah lebih dahulu (*preemptive*) dan bahkan preventif, yang bila perlu difasilitasi oleh koalisi negara-negara dengan kepentingan yang sama namun sama sekali tidak dikekang oleh aturan dan norma komunitas internasional. Pada level yang lebih ekstrem, ide-ide tersebut membentuk suatu visi neoimperial di mana Amerika Serikat mengklaim dirinya sendiri sebagai negara dengan peran global untuk menetapkan standar, menentukan ancaman, menggunakan kekuatan, serta menegakkan keadilan (Samuel P. Huntington, 2005).

Sedangkan di dalam buku Dokumen-dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia (Lubis, 1991) dikatakan bahwa bagaimana Amerika Serikat melaksanakan Politik Luar Negeri neoimperialismenya dalam rangka memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di dunia, adalah dengan melindungi dan memperluas kepentingannya di seantero dunia, tetapi di sisi lain juga memiliki daftar tugas tambahan, yakni mengubah sistem internasional sedapat mungkin menurut citranya sendiri. Oleh karenanya, Amerika Serikat selalu menginginkan

kedua cara tersebut, yaitu bagaimana agar tetap berada di luar dunia, akan tetapi tetap menjadi bagiannya yang penting. Maksud dari kalimat ini menggambarkan keleluasaan Amerika Serikat dalam bertindak untuk tercapainya arah-arrah kebijakannya sebagai negara hegemoni di dunia.

Sifat tidak taat asas, ciri khas yang bertentangan menjadi identitas Amerika Serikat yang sudah bukan rahasia lagi di mata dunia. Politik yang realistik tetapi juga idealistik sebagaimana dipengaruhi oleh Doktrin Monroe, yang mengasingkan diri (isolasionisme) maupun yang bersifat intervensi (intervensionis), yang bijaksana maupun romantik sehingga Amerika Serikat sangat terlihat tidak konsisten. Adapun yang menjadi persamaan Politik Luar Negeri Amerika Serikat, antara lain pengenalan, penyebarluasan kebebasan dan norma kesusilaan serta Hak Asasi Manusia (Lubis, 1991). Walaupun terdapat perbedaan di setiap pergantian presiden Amerika Serikat terutama dalam hal penafsiran terhadap doktrin-doktrin yang ada, namun pada dasarnya posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemoni dunia telah menunjukkan bahwa sifat ekspansionis dan intervensionis terus meningkat, hanya berbeda dalam hal manifestasinya saja. Hal ini semata-mata dilakukan, lagi-lagi demi mencapai arah politik luar negeri neoimperialis negaranya, atau dengan kata lain dapat menguasai negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara dunia ketiga.

Menurut Ikenberry dalam Amerika dan Dunia (2005), sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh Richard Haas, direktur perencanaan kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa Kebijakan luar negeri Amerika

Serikat saat ini memiliki tujuan kepada bagaimana menyatukan negara dan organisasi lain sebagai suatu integrasi sehingga kemudian diperoleh kesepakatan yang akan menjaga konsistensi dunia terhadap kepentingan dan nilai-nilai Amerika Serikat. Dapat kita lihat bagaimana posisi strategis Amerika Serikat yang semakin menguat dari hari ke hari, khususnya terkait implementasi tujuan kebijakan Amerika Serikat sesuai dengan pernyataan Haas tersebut. Bahwa peran hegemoni Amerika Serikat dalam menciptakan tatanan internasional yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, merupakan manifestasi politik neoimperialisme Amerika Serikat yang tidak dapat dihindari.

Ikenberry menggambarkan betapa keadaan dunia dari waktu ke waktu semakin mengancam, tidak hanya bagi negara-negara duni ketiga, atau negara besar selain Amerika Serikat dan sekutunya, melainkan juga bagi Amerika Serikat itu sendiri. Strategi imperial Amerika Serikat yang telah membawa negara superpower ini tidak hanya menjadi semakin kuat dari sisi hegemoni, di sisi lain juga menimbulkan masalah lain yang menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Masalah-masalah tersebut terkait kekuatan Amerika Serikat itu sendiri yang cenderung tidak terkontrol, sehingga kemudian berimplikasi kepada ketiadaannya legitimasi, penyimpangan terhadap norma-norma internasional yang berlaku sehingga dapat menyebabkan kepentingannya justru akan sulit untuk diraih. Bahwa Amerika Serikat dengan strategi besar imperialnya tidak dapat dengan mudahnya menjalankan sekaligus tugas-tugas penting selanjutnya. Di tengah doktrin perang melawan

terorisme yang menjadi prioritas saat ini misalnya Amerika Serikat dihadapkan dengan kebutuhan atas kerja sama dari negara-negara Asia dan Eropa dalam bidang intelijen, penegakan hukum, dan logistik, yang mana disamping itu juga tetap terus membutuhkan hubungan yang berkesinambungan dalam hal liberalisasi perdagangan global, stabilisasi keuangan, serta penanganan kebangkitan Cina. Tulisan Ikenberry membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa perilaku agresif berskala besar tentu akan membawa negara kepada masalah yang lebih besar lagi, dalam hal ini terkait kasus politik neoimperialisme Amerika Serikat, seiring dengan kekuatan negaranya yang semakin besar, usaha-usaha Amerika Serikat dalam rangka mempertahankan hegemoninya merupakan tantangan lebih besar yang harus dihadapi, dan sangat tidak dapat dipungkiri untuk kemudian menemui kegagalan nantinya.

Adapun di dalam pelaksanaannya, Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara di dunia ketiga berjalan dinamis serta relatif, baik dari segi prioritas dan teknik pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Hal tersebut sedikit banyak tergantung pada posisi dan identitas negara yang bersangkutan. Begitupun halnya dengan Uzbekistan, dengan posisi yang sangat strategis serta potensi dalam negerinya, negara yang merupakan tetangga sangat dekat dengan Rusia ini tentu menjadi sasaran empuk bagi Amerika Serikat untuk melancarkan Politik Luar Negeri neoimperialisnya.

## A. Prinsip Dasar

Sebagaimana negara pada umumnya, bahwa pelaksanaan politik luar negeri diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negaranya. Demikian pula halnya dengan Amerika Serikat. Selain adanya peraturan Undang-Undang Dasar yang mengaturnya, Amerika Serikat juga memiliki beberapa determinan lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prinsip dasar pelaksanaan kebijakan-kebijakannya khususnya yang bersifat neoimperialisme terhadap negara-negara dunia ketiga. Poin-poin tersebut mencakup hal-hal yang bersifat ideologis dan diberikan tidak secara konkrit misalnya berupa hitam diatas putih misalnya, sebagaimana Undang-Undang Dasar ataupun peraturan pemerintah resmi lainnya melainkan segala sesuatu yang ditanamkan melalui penyampaian-penyampaian langsung dari kepala negara atau juga lebih dikenal sebagai *Doktrin*; contohnya Doktrin Monroe seperti telah dibahas pada awal bab ini.

Lebih dalam lagi, terkait instrumen ideologis ini, Noam Chomsky (2008) menguraikan di dalam bukunya sesuai dengan gagasan Althusser mengenai aparatus ideologis negara (*Ideological State Apparatuses*) yang merupakan komplementer atas pandangan Arendt, bahwa tidak akan tercapai imperialisme yang berkelanjutan di luar negeri apabila negara tidak mengusahakan represi aktif, atau pembentukan opini publik dan politik tiranik di dalam negerinya. Menurut Chomsky, aparatus ideologis yang membuat seakan-akan politik luar negeri Amerika Serikat ini terlihat wajar di mata masyarakatnya didorong oleh

kecakapan elitnya dalam hal-hal esensial antara lain: (1)Pendidikan doktriner; (2)Rekayasa sejarah dan manipulasi media; serta (3)Kaum intelektual dan demokrasi pasar. Dalam perkembangannya, poin-poin tersebut tidak hanya menjadi alat pembentuk opini publik yang secara khusus mempengaruhi masyarakat di lingkup Amerika dan sekitarnya saja, melainkan seiring dengan keberhasilan dominasinya, bahkan telah mempengaruhi opini masyarakat dunia.

Maka, dalam sub-bab ini akan penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri neoimperialis Amerika Serikat, meliputi Undang-Undang Dasar Amerika Serikat mengenai politik luar negeri sebagai dasar hukum pelaksanaannya; serta adanya doktrin politik sebagai instrumen ideologis yang dalam implementasinya mencakup kecakapan elit Amerika Serikat terkait pendidikan doktriner, rekayasa sejarah dan manipulasi media, serta kaum intelektual dan demokrasi pasar.

### **1. Undang-Undang Dasar Amerika Serikat**

Secara resmi, Politik Luar Negeri Amerika Serikat diatur di dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada *section* mengenai hubungan Luar Negeri. Di dalamnya, diatur bahwa Kongres memiliki kekuasaan seluas-luasnya dalam hal hubungan luar negeri Amerika Serikat, meliputi pemungutan pajak, bea, pembebanan dan cukai; meminjam uang atas nama Amerika Serikat; perdagangan luar negeri; penetapan peraturan naturalisasi; peraturan terkait keuangan moneter dan asing; pengadaan hukuman atas

pemalsuan dokumen berharga dan keuangan; Ilmu Pengetahuan dan Seni; pembentukan pengadilan dengan tingkat di bawah Mahkamah Agung; peraturan atas kejahatan di lautan serta pelanggaran atas hukum bangsa-bangsa; pemakluman atas perang; wewenang atas angkatan darat dan angkatan laut; wewenang atas tata organisasi negara; hingga pelaksanaan pembuatan undang-undang. Adapun presiden akan memegang kekuasaan eksekutif sesuai masa waktu jabatan empat tahun bersama wakil presiden yang juga dipilih untuk jangka waktu yang sama (Lubis, 1991).

Dalam Undang-Undang tentang hubungan luar negeri Amerika Serikat, secara jelas diuraikan mengenai kekuasaan kongres untuk mengatur seluas-luasnya pelaksanaan politik luar negeri yang kemudian akan diwujudkan sebagai kebijakan-kebijakan luar negeri. Adapun untuk negara bagian tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian, persekutuan ataupun konfederasi apapun; segala hal yang hendak dilakukan oleh negara bagian terkait hubungan luar negeri haruslah berdasarkan persetujuan dari kongres. Termasuk presiden, juga tidak terlepas dari ketentuan bahwa segala sesuatu terkait kebijakan luar negeri harus disetujui kongres, maka ketika kemudian presiden mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota kongres, kebijakan luar negeri dari presiden akan mudah terlaksana. Dari sini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat bersifat sentral dalam hal ini di tangan kongres yang memegang kekuasaan legislatif, sehingga dapat



mencegah arah politik luar negeri yang melenceng dari haluan Politik Luar Negeri yang dianut Amerika Serikat, dalam kasus ini salah satunya terkait sifat neoimperialismenya.

## **2. Instrumen Ideologis**

Selain berdasar pada Undang-Undang sebagai peraturan resmi negaranya, Politik Luar Negeri Amerika Serikat juga didukung oleh adanya instrumen-instrumen ideologis yang pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat di dalam negerinya, yang dalam perkembangannya cenderung semakin masif dan luas hingga mempengaruhi perspektif dunia terhadap politik luar negeri neoimperialisme yang dijelankannya.

Instrumen ideologis yang menjadi determinan penting politik luar negeri Amerika Serikat adalah berupa doktrin politik, yang mana di sepanjang sejarah perjalanan pergantian kepemimpinan politiknya, pada umumnya disampaikan oleh presiden yang menjabat kepada masyarakatnya melalui pidato resmi kenegaraan. Adapun dalam perkembangannya, doktrin-doktrin yang ada kemudian tidak hanya mempengaruhi perspektif masyarakat atau penduduk Amerika Serikat saja, melainkan juga penduduk di negara-negara sekitarnya dan bahkan masyarakat di seluruh dunia. Dapat dikatakan, semakin bertambah tingkat prioritas Amerika Serikat terhadap suatu isu yang akan membawanya kepada eksistensi imperial yang lebih kuat, maka semakin besar pula level berkembang dan meluasnya perspektif yang ditanamkan dapat

mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Apakah masyarakat dunia kemudian bersifat pro ataupun kontra terhadap perspektif yang coba ditanamkan Amerika Serikat dalam setiap doktrin politiknya, hal tersebut justru membuat Amerika Serikat semakin hari kian berkembang menjadi aktor besar yang terlibat dalam setiap elemen kehidupan di tingkat global.

Pidato Perpisahan Washington adalah salah satu poin penting yang perlu menjadi catatan dalam memahami bagaimana arah Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Pidato tersebut menyangkut masalah pokok mengenai peran apakah yang harus dimainkan oleh moralitas dan kepentingan nasional sendiri dalam hubungan luar negeri yang demokratik. Di penghujung masa jabatannya yang kedua, atas bantuan Hamilton, Presiden Washington menyusun pesannya yang terakhir untuk seluruh rakyatnya. Ia mendesak mereka supaya dapat menghindarkan diri dari perpecahan dalam negeri serta memperingatkan terhadap ancaman akan persekutuan yang sifatnya permanen dengan kekuatan di Eropa (Lubis, 1991). Isi pidato perpisahan tersebut didorong oleh kondisi politik Amerika dan kawasan di sekitarnya, yang mendesak Amerika Serikat untuk berusaha menghindarkan diri dari pengaruh negara-negara kuat Eropa sehingga kemudian mengharuskan Amerika Serikat agar dapat menguatkan dirinya dari segi internal. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan cikal bakal politik isolasionisme Amerika Serikat yang akan berlanjut nantinya pada fase selanjutnya, yakni fase ekspansionisme.

Poin penting doktrin berikutnya terkait politik luar negeri neoimperialis Amerika Serikat adalah adanya Doktrin Monroe. Pada tahun 1823 dalam pidato tahunannya Presiden Monroe mengemukakan kepada Kongres mengenai pedoman untuk berjalannya politik luar negeri Amerika Serikat di masa itu. Melalui doktrin ini, dikemukakan oleh Monroe kepada kongres bahwa Amerika Serikat akan tetap terus berpegang pada pesan Presiden George Washington akan *stance* yang jelas terhadap Eropa, yakni bersikap netral terhadap konflik yang terjadi; kemudian menyatakan bahwa segala usaha pendudukan yang dilakukan oleh Eropa merupakan ancaman atas perdamaian dan keamanan negara, sehingga kemudian berdasarkan prinsip kedaulatan yang bebas dan merdeka maka tidak ada bagian dari benua Amerika yang dapat dijadikan sebagai sasaran kolonialisasi Eropa; serta Amerika Serikat juga tidak akan terlibat atau ikut serta dalam segala bentuk koloni atau kelompok kekuasaan dengan negara Eropa manapun. Pada dasarnya doktrin ini lagi-lagi didorong oleh kondisi politik dunia pada saat itu, yang memaksa Amerika Serikat untuk dapat membendung kekuatan besar intervensi Eropa terhadap wilayah Amerika Serikat, juga bangkitnya kekuatan kolonialisme baru dari Spanyol, serta Rusia yang juga mencoba melancarkan pengaruhnya di kawasan Amerika Tengah dan Selatan. Doktrin ini sangat berpengaruh, kemudian terus dilanjutkan oleh presiden-presiden Amerika Serikat selanjutnya seperti John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt,

serta relatif terus berlanjut dalam mempengaruhi prinsip politik luar negeri Amerika hingga saat ini.

Secara lebih spesifik, implementasi doktrin-doktrin yang ada sebagaimana dikemukakan oleh Chomsky (2008) yang dijelaskan dengan *Ideological State Apparatuses* atau aparatus ideologi negara berupa pilar-pilar esensial yang saling berkesinambungan satu sama lain. Pilar-pilar yang diuraikan Chomsky dalam karyanya yang berjudul *Neoimperialisme Amerika Serikat* seperti akan dijelaskan di bawah ini sangat sesuai dengan bagaimana konsep politik luar negeri secara umum, bahwa politik luar negeri itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional juga sistem *international environment* yang kemudian membutuhkan dukungan berupa opini publik yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat.

Berikut uraian mengenai pilar-pilar penyangga utama politik neoimperialisme Amerika Serikat:

**a) Demokrasi dan pendidikan**

Mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pendidikan, Chomsky salah satunya terinspirasi atas pemikiran John Dewey, yang meyakini bahwa perkembangan dalam dunia pendidikan dapat menjadi suatu pendorong terhadap perubahan sosial di dalam masyarakat. Bahwa pendidikan yang seharusnya adalah dengan mendorong masyarakat untuk

dapat memperoleh pola-pola kreatif dan kritis, melalui metode-metode eksploratif sejak usia dini untuk proses yang alami sehingga kemudian secara berkelanjutan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya bangsa yang berkemajuan (Chomsky, 2008).

Namun tidak demikian halnya yang diterapkan di Amerika Serikat, bahwasanya di balik kemajuan negaranya pada berbagai aspek, sesungguhnya elit pemerintah Amerika Serikat sangatlah ketat dalam mengontrol bagaimana pelaksanaan pendidikan di negara superpower tersebut. Hal ini terkait erat dengan implementasi politik neoimperialismenya, dimana Amerika memasukkan doktrin-doktrin yang terkait secara masif melalui proses pendidikan untuk menanamkan kepada segala hal yang mendukung elit pemerintah serta mengontrol agar masyarakat tetap bertidak sesuai dengan yang apa diinginkan oleh negara.

Betapa masifnya pendidikan doktriner ini dilaksanakan oleh Amerika Serikat, dibuktikan dengan tidak hanya melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal, melainkan hingga kepada level paling dasar dimana pendidikan itu dimulai pada setiap orang, yakni pendidikan berupa bimbingan yang optimal dalam lingkup keluarga untuk setiap anak. Terkait hal ini, dapat kita katakan bahwa negara yang mengklaim dirinya sebagai polisi Hak Asasi Manusia di dunia ini

merupakan negara yang tidak pro anak. Seperti dikemukakan oleh Hewlett, bahwasanya sebanyak 146 negara telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Anak; sedangkan Amerika Serikat tidak. Kebijakan anti anak Amerika Serikat juga diterapkan melalui doktrin terhadap orang tua dalam hal bagaimana memberikan *treatment* terhadap anak-anaknya. Misalnya ketika Hallmark Corporation membuat kartu-kartu ucapan untuk disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sebagai ekspresi simbolik atau doktrin secara tidak langsung. Kalimat-kalimat ucapan seperti “Nikmati Lebih harimu yang luar biasa di sekolah” yang wajib diselipkan para orang tua di balik kotak bekal makan siangnya, atau “Aku berharap memiliki lebih banyak waktu bersamamu” yang harus diselipkan di bawah bantal saat anak-anak akan pergi tidur sendirian, yang sifatnya sangat sederhana namun memiliki efek yang berkelanjutan. Cara-cara seperti ini seringkali justru menjadi lebih besar efeknya, dan hingga saat ini menjadi strategi kebijakan Amerika Serikat yang diterapkan dalam berbagai aspek. Masih terkait pendidikan anak di lingkup keluarga, melalui kebijakan korporatnya, elit Amerika juga membuat para orang tua diharuskan mengambil jangka waktu kerja yang lebih lama, demi angka penghasilan yang lebih besar. Tentulah hal tersebut sangat tidak pro terhadap hak-hak anak (Chomsky, 2008).

Belajar dari sejarah kemunculan berbagai gerakan kerakyatan penentang imperialisme yang menuntut hak sipil-politiknya pada tahun 50-70an, dimana saat itu Amerika Serikat mengatasinya dengan pembentukan Komisi Trilateral yang berfungsi “untuk menanamkan kepatuhan”, atau bagaimana secara teknis bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuatan pemerintah dengan cara mengont rol melalui sistem penggajian khusus terhadap para kalangan menengah seperti peneliti, ilmuwan dan pakar agar terus menjadi agen-agen penyebarluas atas kebijakan nilai-nilai Amerika Serikat. Itulah mengapa kemudian di Amerika Serikat pendidikan menjadi sarana esensial pertama yang digunakan untuk memasukkan doktrin-doktrin pemerintah sejak dini kepada masyarakat, atau Chomsky menyebutnya dengan penanaman kesadaran palsu (Chomsky, 2008). Dengan ini, maka masyarakat justru akan semakin tunduk dan mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

#### **b) Keterampilan rekayasa sejarah**

Keterampilan rekayasa sejarah dan manipulasi media yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga saat ini dapat kita katakan merupakan salah satu sumber kekuatan utama negara hegemoni tersebut. Chomsky menyebut praktik rekayasa sejarah dan manipulasi media sebagai sebuah ‘keahlian khusus’ Amerika Serikat yang telah mulai dilakukan sejak

terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Bahwasanya Amerika Serikat memiliki penguasaan yang luas dan kuat terhadap sumber-sumber informasi, media dan pengetahuan sehingga menjadi mudah untuk elit pemerintah kemudian dapat melakukan berbagai macam manipulasi di dalamnya. Hal ini sangat membantu untuk lebih dalam lagi memasukkan nilai-nilai Amerika Serikat ke dalam lingkup masyarakat, terlebih lagi dengan didukung oleh perkembangan media yang semakin pesat dari waktu ke waktu (Chomsky, 2008).

Melalui keterampilannya ini, Amerika Serikat membentuk opini publik dengan pola khusus, tidak hanya dengan menutup mata masyarakat atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan elit pemerintah sembari terus mengagung-agungkan nilai dan prinsip yang dianut, melainkan juga dengan keras terus mengutuk segala sesuatu yang dilakukan para musuh atau pihak yang dirasa mengancam serta mendukung tindakan apapun, baik maupun buruk dari para sekutu atau klien politik luar negerinya, misalnya Israel. Amerika Serikat juga seringkali melakukan *sensor* atas informasi mengenai berbagai Konferensi Tingkat Tinggi yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat hanya mengandung poin-poin yang telah disepakati saja. Salah satu hal yang dilarang untuk dilakukan pemberitaan terhadapnya adalah terkait jumlah suara voting di forum Perserikatan



Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang peningkatan perlombaan senjata dunia, yang mana satu-satunya negara penentang hal tersebut adalah Amerika Serikat. Fakta bahwa Amerika Serikat mengambil sikap veto pada sebagian besar resolusi Dewan Keamanan PBB juga tentu saja tidak pernah sampai informasinya kepada masyarakat (Chomsky, 2008).

Di dalam uraian Chomsky mengenai hal ini, diungkapkan secara rinci mengenai menifestasi rekayasa sejarah yang dilakukan Amerika Serikat secara rinci meliputi bagaimana rekayasa sejarah itu sendiri dilakukan terutama melalui kontrol atas media; kemudian kewajiban tutup mulut, bahwa apapun yang dapat disampaikan kepada publik adalah segala bentuk tindakan yang dikemas sebagai suatu kebajikan; selanjutnya terkait berbagai Pertemuan Tingkat Tinggi; juga pengawasan ketat atas media dan opini internasional; serta penghancuran atas kesepakatan-kesepakatan.

Terdapat sangat banyak contoh mengenai pilar *ideological apparatus* yang satu ini, salah satunya pada November 1988 ketika Majelis Umum PBB mengadakan voting atas sebuah resolusi yang ‘mengutuk’ Israel karena “membunuh dan menderai oerang-orang Palestina dan “sangat menyesalkan” ketidakpedulian Israel terhadap resolusi-resolusi PBB sebelum-sebelumnya yang mengutuk tindakan-tindakannya di wilayah pendudukan; dimana pada saat itu voting menghasilkan jumlah suara sebanyak 130 berbanding 2, yang tidak lain pemilik suaranya adalah

Amerika Serikat dan Israel. Fakta ini benar-benar dipastikan tidak diberitakan oleh pers, melainkan membahas bagaimana posisi Amerika Serikat dan Israel, negara mana saja yang abstain, serta rendahnya angka dukungan dari negara-negara Arab di dalam voting tersebut. Adapun mengenai negara-negara pendukung resolusi, artikel *New York Times* yang memberitakannya pada saat itu hanya menyebutnya sebagai wujud keberatan yang berasal dari negara-negara yang menganggap tindakan Israel “tak berimbang” (Chomsky, 2008).

Dari sini sangatlah jelas, bahwa misalnya kemudian kita mempertanyakan peran PBB terhadap berbagai masalah atau kekacauan yang terjadi di tengah tatanan dunia internasional, inilah salah satu jawaban utamanya, yakni kekuatan Amerika Serikat tidak hanya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, namun juga keterampilannya atas kontrol yang ketat terhadap media. Singkatnya, bagaimanapun tindakan ‘tidak taat asas’ yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetaplah akan dirancang sedemikian rupa sehingga akan nampak di mata masyarakat sebagai sebuah kewajaran dan bahkan kebajikan yang harus terus dibela. Seperti itulah keadaan kultur politik dan media massa yang terbentuk di Amerika Serikat.

**c) Demokrasi pasar di tengah tatanan neoliberal: doktrin dan realitas**

Proses pembentukan opini publik dengan tindakan propaganda dan doktrin demi tercapainya kekuasaan elit yang semakin kuat, merupakan keahlian khusus lain yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah sangat terbiasa dalam hal melakukan usaha-usaha menundukkan atau mendikte opini publik, merekayasa konsensus, serta melakukan tindakan-tindakan manipulasi terencana dan cerdas atas kebiasaan-kebiasaan dan opini massa secara terorganisir (Chomsky, 2008).

Bagaimana upaya-upaya propaganda itu dilakukan, secara teknis tidak hanya melalui media saja, tetapi juga dilakukan oleh para kaum intelektual. Pilar ini berkaitan sangat erat dengan adanya doktrin yang ditanamkan khususnya pada masa-masa awal kebangkitan Amerika Serikat, yang wujudnya lebih kepada pelaksanaan doktrin itu secara berkelanjutan dan lebih kompleks serta disesuaikan dengan prioritas politik luar negerinya dari waktu ke waktu (Chomsky, 2008).

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah seperti apa peran para kaum intelektual menanamkan nilai-nilai demokrasi pasar di tengah tatanan sistem neoliberal. Doktrin terkait hal ini mengatakan bahwa “kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin” adalah suatu kemenangan atas masa depan demokrasi dan pasar bebas. Bahwa antara doktrin tersebut dan

realita yang terjadi di dalam tatanan internasional sungguh sangat tidak sejalan. Bahkan, struktur dasar dari ekonomi domestik Amerika Serikat sesungguhnya melanggar prinsip-prinsip neoliberal yang dielu-elukannya (Chomsky, 2008).

Chomsky mengungkapkan bahwa inti utama yang menggerakkan sejarah bisnis Amerika Serikat ialah bahwa “perusahaan bisnis modern telah mengambil alih mekanisme-mekanisme pasar dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ekonomi dan pengalokasian sumber daya”, menangani banyak transaksi internal, dan semua ini jelas merupakan penyimpangan lain dari prinsip-prinsip pasar. Salah satu contohnya adalah bahwa Washington menggunakan kekuasaannya untuk menghambat pembangunan secara mandiri di negara-negara lain. Misalnya kasus Haiti yang berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Pada tahun 1981, strategi pembangunan USAID-Bank Dunia dimulai. Strategi itu didasarkan pada pendirian pabrik-pabrik perakitan dan agroekspor, dan strategi ini menggeser fungsi tanah dari penyedia pangan sebagai sumber untuk terpenuhinya konsumsi lokal. USAID meramalkan terjadinya suatu perubahan bersejarah menuju ke arah interdependensi pasar yang semakin dalam dengan Amerika Serikat, sehingga nantinya negara itu akan menjadi “Taiwannya Karibia”. Sementara Bank Dunia setuju dengan kesimpulan itu sambil menawarkan resep-resep yang biasa diberikannya

demikian tercapainya “ekspansi perusahaan swasta” dan minimisasi “tujuan-tujuan yang bersifat sosial”. implikasi dari hal ini adalah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan ekonomi yang sangat signifikan di Haiti sehingga menurunkan tingkat kesehatan, pendidikan serta tentunya kesejahteraan di negara tersebut. Sementara itu, studi-studi Bank Dunia teknis justru menyatakan bahwa kesetaraan relatif serta standar kesehatan dan pendidikan yang tinggi merupakan faktor-faktor penting yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Di sini sangat nampak, peran intelektual Bank Dunia yang menyatakan dalamnya jurang antara doktrin yang ditanamkan oleh sifat neoimperial Amerika Serikat dengan realitas yang terjadi. Semakin dalam, jika kita terus berusaha untuk membedakan antara doktrin serta realitas, maka akan kita dapati bahwa prinsip-prinsip politik ekonomi yang berlaku sangatlah berbanding terbalik dengan doktrin yang diproklamirkan. Apa yang akan terjadi di masa depan tentu sudah barang tentu dapat kita bayangkan, mengenai bagaimana bentuk praktik ekonomi politik dilaksanakan oleh negara-negara yang masih cenderung sulit untuk bersikap skeptis terhadap doktrin-doktrin demokrasi pasar dalam tatanan neoliberal yang ditanamkan oleh Amerika Serikat di tengah jalannya pelaksanaan politik luar negerinya (Chomsky, 2008).

Berdasarkan adanya uraian sub bab ini, dapat dipahami betapa Amerika Serikat berdasarkan prinsip-prinsipnya yang khas, melaksanakan politik

neoimperialismenya melalui berbagai aspek, mulai dari yang bersifat general hingga pada aspek-aspek yang sifatnya paling kompleks di dalam masyarakat. Bahwa dalam perjalanannya, manifestasi politik neoimperialisme Amerika Serikat tidak hanya terkait kepada persoalan ekonomi politik saja, tetapi bahkan hingga mencakup persoalan-persoalan di segala aspek, yang hingga saat ini terutama diusung oleh isu demokratisasi dan Hak Asasi Manusia sebagai sarannya. Pada intinya adalah, bagaimana Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni terbesar di dunia dapat semakin melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara dunia ketiga dengan berbagai cara yang mana semakin kompleks seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan global berikut berbagai gejolaknya.

## **B. Politik Luar Negeri Neoimperialis Amerika Serikat di Uzbekistan**

Untuk memahami bagaimana ambisi Amerika Serikat di wilayah Republik Uzbekistan, maka terlebih dahulu perlu untuk diketahui bagaimana Uzbekistan sebagai sasaran politik neoimperialisme Amerika Serikat dalam hal ini merupakan negara yang sangat strategis hampir pada setiap aspek, sehingga merupakan sasaran yang empuk bagi Amerika Serikat untuk melancarkan pengaruhnya.

Uzbekistan, atau secara resmi dikenal dengan Republik Uzbekistan dengan Tashkent sebagai ibukotanya, terletak di kawasan Asia Tengah, dan berada di posisi sentral diantara negara-negara di Kawasan Asia Tengah lainnya, yakni Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan serta Kyrgistan yang dinyatakan merdeka

secara resmi dari Uni Soviet pada 1 September Tahun 1991 bersama-sama juga dengan negara-negara anggota Commonwealth Independent States (CIS) lainnya. Secara strategis, posisi Uzbekistan berbatasan langsung dengan Kazakhstan di utara sejauh 2.203 km, Kyrgistan 1.099 km di sebelah Timur, Turkmenistan 1.621 km ke arah barat, serta Tajikistan dan Afghanistan ke Selatan, masing-masing sejauh 1.1161 km dan 137 km. Dengan luas wilayah total 447.400 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 425.400 km<sup>2</sup> tanah dan 22.000 km<sup>2</sup> air, Uzbekistan merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang besar di sentral Asia. Negara beriklim gurun ini memiliki sumber daya alam antara lain gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, uranium, perak, tembaga, timbal dan seng, tungsten, serta molybdenum. Uzbekistan merupakan salah satu dari dua negara di dunia yang terkurung daratan, selain negara Liechtenstein. Jumlah penduduk Uzbekistan sebanyak 26.410.416 jiwa dan terbagi atas Etnis Uzbek 80%, Rusia 5,5%, Tajik 3%, Kazakh 3%, Karakalpak 2,5%, Tatar 1,5%, lain-lain 2,5% serta persebaran Agama Islam (Mayoritas Sunni) 88%, Ortodox Timur 9%, lain-lain 3%. Uzbekistan juga merupakan negara dengan populasi terpadat di Asia Tengah<sup>5</sup>. Kemudian untuk lebih jelas mengenai posisi strategis Uzbekistan secara geografis, berikut peta Uzbekistan:

---

<sup>5</sup>Embassy of Uzbekistan to the United States (2004). *About Uzbekistan*. Diakses pada Maret 23, 2017, dari Embassy of Uzbekistan to the United States: <https://www.uzbekistan.org/uzbekistan/geography/>





Secara ekonomi, kondisi Uzbekistan di masa-masa awal kemerdekaannya cukup baik dibanding negara-negara pecahan Soviet lainnya. Uzbekistan merupakan negara yang relatif tidak merasakan efek signifikan atas runtuhnya Uni Soviet dengan sumber daya alamnya yang terbilang melimpah, yakni kapas dan emas yang termasuk sebagai komoditas utama dunia. Selain itu sejak tahun 1990-an, produksi minyak dan gas bumi juga mulai meningkat secara signifikan. Secara umum, Uzbekistan banyak mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi Soviet, misalnya mengenai kebijakan ekonomi yang berada di bawah kontrol negara. Pada awal tahun 2000-an, pertanian menjadi sektor ekonomi yang paling penting di samping sektor-sektor lainnya. Sektor Pertanian dan industri pengolahan produk pertanian (terutama yang terkait dengan kapas dan makanan) secara konsisten menyumbang sekitar 35 persen PDB Uzbekistan. Namun, dalam perjalanannya perluasan sektor ini telah terhambat oleh kontrol negara atas pasar pertanian, kekurangan peralatan, dan larangan kepemilikan lahan pribadi. Sektor ekspor kapas kemudian mengalami penurunan pada awal tahun 2000-an. Pada masa periode pasca-Soviet tersebut, Rusia tetap menjadi mitra utama untuk ekspor dan impor. Negara bekas pecahan Soviet lainnya yang menjalin hubungan ekonomi dengan Uzbekistan antara lain Tajikistan dan Ukraina (The United States Marine Corps, 2007).

Pada aspek politik, Uzbekistan di masa-masa awal kemerdekaannya cenderung ingin meninggalkan ideologi lama warisan Soviet. Konstitusi tahun

1992 menyerukan sebuah sistem pemerintahan sekuler, demokratis, kebebasan berekspresi dan beragama serta supremasi hukum (*Rule of law*). Meskipun begitu, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif yang pada saat itu dipimpin oleh presiden Islam Karimov cenderung mendominasi ketiga elemen tersebut. Lembaga-lembaga kekuasaan mulai dari perdana menteri, kabinet, dan parlemen memiliki kekuatan yang sangat terbatas, sementara lembaga yudikatif sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif. Di sisi lain, partai-partai oposisi tidak dapat bergerak. Kekuatan Karimov saat itu terbukti bahwa ia mendapatkan perpanjangan jabatan hingga 7 tahun pada tahun 2002. Kemudian terkait lembaga legislatif pemerintahannya, anggota senat tidak dipilih secara langsung melainkan ditunjuk oleh presiden sebanyak 16 orang anggota, yang mana 6 anggota dipilih oleh masing-masing dari 14 yurisdiksi bawahan, yang terdiri dari 12 provinsi, Republik Otonomi Karakalpakstan, dan Kota Tashkent (The United States Marine Corps, 2007).

Uzbekistan sebagai satu-satunya negara yang telah mencukupi kebutuhan pangan dan energinya, secara terbuka kemudian telah mulai mencari dominasi ekonomi di kawasannya. Posisi ini cukup mendorong adanya ketegangan yang serius dengan tetangganya, yakni Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan disebabkan oleh berbagai isu. Sumber Tajikistani bahkan sempat mengklaim bahwa 68 orang Tajik terbunuh pada sekitar tahun 2000-an dikarenakan adanya ranjau darat yang ditempatkan di Uzbekistan, tepatnya pada wilayah

perbatasannya dengan Tajikistan (The United States Marine Corps, 2007). Dari sini diketahui bahwa kebutuhan Uzbekistan akan jaminan keamanan negaranya dapat dikatakan cukup besar, yang mana hal ini juga didukung oleh data dari The United States Marine Corps, bahwasanya tujuan utama kebijakan luar negeri Uzbekistan di era pasca Soviet adalah memastikan keamanan nasional dalam menghadapi konflik di Tajikistan dan Afghanistan, serta kemungkinan ambisi teritorial Iran dan Pakistan. Khususnya terkait instabilitas di Afghanistan, Uzbekistan berada pada *stance* yang jelas bahwa pihaknya setuju, mengenai kemungkinan meluasnya instabilitas yang terjadi hingga kepada kawasan Asia Tengah jika konflik tersebut tidak ditangani dengan serius. Ini merupakan salah satu celah utama dimana Amerika Serikat kemudian dapat mengambil posisi strategis di sisi Uzbekistan.

Dari aspek-aspek yang disebutkan diatas, terlepas dari latar belakang Uzbekistan sebagai negara pecahan Soviet yang masih membawa pengaruh-pengaruh warisan ideologi blok timur, negara yang pada saat itu terhitung baru saja merdeka ini dinilai cenderung memiliki intensi untuk meninggalkan pengaruh-pengaruh yang masih ada dan menggantikannya dengan pemerintahan berbasis demokratisasi, hak asasi manusia dan *rule of law*. Ditambah lagi dengan kebutuhannya atas reformasi ekonomi, mengingat bahwa dengan segala potensi yang ada Uzbekistan telah mulai mengalami penurunan disebabkan oleh sistem pelaksanaan ekonominya dengan kontrol kuat dari pemerintah maka dibutuhkan

adanya reformasi terhadap pelaksanaan ekonomi negaranya, serta alasan keamanan yang menuntut Uzbekistan untuk dapat memperkuat militer negaranya. Di sini kemudian Amerika Serikat melihat bahwa ada peluang baginya untuk masuk dan menjalin kerja sama dengan Uzbekistan.

Selanjutnya, perihal bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat diterapkan dalam hubungannya dengan Uzbekistan, tentu tidak lepas dari fakta bahwa Uzbekistan merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting di Kawasan Asia Tengah. Negara-negara di Kawasan Asia Tengah yang menurut Sir Harfold Mackinder ini adalah kawasan paling strategis di dunia. Negara-negara tersebut mulai membuka dirinya untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar sejak secara resmi merdeka dari Uni Soviet. Begitu pula halnya dengan Republik Uzbekistan, dalam hal ini terkait hubungannya dengan Amerika Serikat.

Dengan segala fakta yang ada, bahwa Uzbekistan dengan dengan sejumlah potensi strategis yang dimilikinya, maka sungguh merupakan suatu kemustahilan bagi negara-negara imperialis khususnya Amerika Serikat dalam hal ini untuk kemudian melewatkan kesempatan mengambil keuntungan dari Uzbekistan, melalui hubungan luar negeri yang dapat dijalin dengan negara tersebut. Terlebih didukung oleh fakta bahwa sebagai negara yang pada saat itu baru saja merdeka, Uzbekistan tentunya membutuhkan dukungan dari negara lain terutama berupa kerja sama luar negeri untuk kemandirian dan kemajuan negara khususnya dari segi keamanan dan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bahwa di

sisi lain, merupakan sebuah kesempatan besar bagi Uzbekistan ketika negara super power seperti Amerika kemudian dapat menjadi partner kerja sama yang akan membantu memajukan pembangunan negaranya.

Menurut situs resmi Global Security, sejak Tahun 1992, keduanya telah mulai menjalin kerja sama luar negeri ditandai dengan dibukanya The United States of America Embassy di Tashkent, ibukota Republik Uzbekistan<sup>7</sup>. Sejak dimulainya hubungan luar negeri antara keduanya, Kebijakan Amerika Serikat terhadap Uzbekistan adalah mendukung pembangunan Uzbekistan sebagai negara merdeka dan berdaulat yang melaksanakan demokrasi sesuai dengan *rule of law*.

Uzbekistan telah mulai menerima bantuan Amerika Serikat yang terdiri atas U.S. Foreign Military Financing (FMF), International Military Education and Training (IMET), dan bantuan-bantuan lainnya sejak akhir tahun 1990. Dalam perkembangannya, hubungan antara kedua negara semakin intensif dari waktu ke waktu hingga kemudian tepatnya pada tanggal 12 Maret 2002, ditandai dengan kunjungan Islam Karimov yang menjabat sebagai Presiden Uzbekistan saat itu disepakati “Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework between the United States of America and the Republic of Uzbekistan”

---

<sup>7</sup>GlobalSecurity.org. (2014). Diakses pada Maret 23, 2017, dari GlobalSecurity.org: <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/uzbek-forrel-us.htm>

## **Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework**

Kerja sama strategis antara Amerika Serikat dan Uzbekistan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya prioritas Amerika Serikat terhadap wilayah Afghanistan pasca momentum 11 September 2001 yang secara otomatis mendorong kebutuhan Amerika Serikat atas akses militer di wilayah perbatasan Afghanistan untuk melawan terorisme demi stabilisasi keamanan di kawasan tersebut. Amerika Serikat melakukan negosiasi untuk mendapatkan hak atas Karshi Khanabad sebagai dukungan terhadap operasi militer di Afghanistan. Tepatnya pada tanggal 12 Maret 2002, ketika kunjungan Presiden Islam Karimov ke Amerika Serikat, Secretary of State Amerika Serikat pada saat itu Collin Powel dan Menteri Luar Negeri Uzbekistan menandatangani perjanjian “United States-Uzbekistan Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework”.

Dengan adanya kerja sama strategis ini, Amerika Serikat secara resmi membuka pangkalan militernya di Karshi Khanabad, salah satu wilayah bagian selatan Uzbekistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Pangkalan militer ini lebih dikenal dengan sebutan Karshi Khanabad (K-2) Airbase. Lebih tepatnya, Khanabad terletak di Provinsi Qashqadaryo yang gersang di dekat perbatasan dengan Tajikistan. Daerah gurun pasir ini merupakan lokasi yang ideal sebagai lokasi basis militer, baik dari kondisi dataran serta cuaca<sup>8</sup>. Berikut peta letak K-2 Airbase:

---

<sup>8</sup>Global Security. (2011, September). *Karshi Khanabad Airbase*. Diakses dari Globalsecurity.org: <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad.htm>

**Gambar 2.3 Letak Karshi Khanabad**



Sumber: CNN<sup>9</sup>

Dari gambar di atas terlihat bagaimana letak Karshi Khanabad begitu strategis, selain memang berbatasan langsung dengan Afghanistan, juga cenderung terletak di tengah-tengah dari wilayah negara-negara di kawasan Asia Tengah lainnya, sehingga menjadi nilai tambah bagi lokasi tersebut sebab memiliki akses yang mudah untuk menjangkau hampir setiap wilayah negara di kawasan tersebut.

Sebelumnya, sekitar tahun 1979 pangkalan udara ini merupakan bagian dari operasi di Afghanistan pada era Soviet. Bahkan terkait Karshi Khanabad pula, pada masa-masa awal pasca kemerdekaan Uzbekistan, antara Uzbekistan dan Rusia sempat menandatangani sebuah perjanjian kerjasama yang berisi ketentuan-ketentuan bantuan Rusia menyangkut pelatihan, alokasi lapangan udara, komunikasi, dan

---

<sup>9</sup>CNN, "Karshi Khanabad Map", Diakses pada 26 April 2017 pukul 00.13 dari <http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/deployment.map/karshi.html>

informasi mengenai ruang udara serta instalasi pertahanan udara. Kemudian, sejak 5 Oktober 2001, Amerika Serikat mendapatkan izin dari pihak Uzbekistan untuk melakukan operasi dasar di negara tersebut terkait agenda *Operating Enduring Freedom* demi stabilitas keamanan di sekitar kawasan Afganistan serta perang melawan terorisme pasca momentum serangan WTC 11 September 2001. Kehadiran pasukan Amerika Serikat sejak saat itu diperkirakan akan berkembang hingga pada angka ribuan, yang di dalamnya termasuk pasukan operasi khusus. Pertengahan Oktober 2001, telah ada 3 lapisan keamanan di sepanjang 5km sekitas Khanabad, dengan komposisi lapisan luar diwakili oleh tentara Uzbekistan, serta lapisan dalam diwakili oleh tentara Amerika Serikat<sup>10</sup>. Pangkalan militer ini selanjutnya secara resmi dibuka sekaligus dengan diratifikasinya perjanjian strategis pada Maret 2002. Secara otomatis, perjanjian Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework ini membawa Uzbekistan kepada posisi yang menjauh terhadap tetangga lamanya, Rusia.

---

<sup>10</sup>Globalsecurity.org. (2011, September). *Karshi-Khanabad (K-2) Air Base Camp Stronghold Freedom Khanabad, Uzbekistan*. Diakses pada April 25, 2017, dari Globalsecurity.org: <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad-ops.htm>



**Gambar 2.4 Karshi Khanabad (K-2) Airbase**



Sumber: Global Security<sup>11</sup>

**Gambar 2.5 Karshi Khanabad (K-2) Airbase**



Sumber: Global Security<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Globalsecurity.org. Diakses pada April 25, 2017 pukul 00.18 dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad-pics.htm>

<sup>12</sup>Globalsecurity.org., *ibid*

## Gambar 2.6 Kasrhi Khanabad (K-2) Airbase



Sumber: Global Security<sup>13</sup>

Gambar-gambar di atas menampilkan kondisi dari pangkalan militer K-2 Airbase yang keseluruhannya berukuran satu mil persegi. Pangkalan militer ini dipastikan dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi penerbang, yang didukung dengan fasilitas-fasilitas baik dalam hal penyediaan peralatan maupun tempat tinggal bagi para pasukan. Selain bangunan-bangunan yang berkonstruksi keras sehingga aman untuk logistik pasukan, mayoritas fasilitas di sana adalah tenda, sebagai tempat tinggal para pasukan militer yang sebagaimana terlihat, berjumlah cukup banyak agar dapat memastikan seluruh pasukan militer yang kurang lebih berjumlah 1.000 orang dapat menetap disana dengan nyaman. Pangkalan miiter ini juga dipastikan dapat memadai untuk pesawat-pesawat yang beroperasi di sana, salah satunya yang paling sibuk yakni Lockheed C-130 Hercules. Selain itu, akses darat juga selalu dipastikan terjamin di pangkalan militer ini sebab untuk

---

<sup>13</sup>*Ibid*

mendukung pasukan AS di Afghanistan dan negara-negara sekitarnya di Asia Tengah memerlukan pergerakan transportasi darat dengan kereta api dan truk melintasi ribuan kilometer dari beberapa wilayah paling terlarang di dunia. Secara keseluruhan, memanglah pangkalan militer ini relatif kecil, sebagaimana juga terlihat pada gambar-gambar di atas. Namun dengan posisinya yang sangat strategis, dengan fasilitas yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah setempat menjadi faktor pendukung dari aktivitas di pangkalan militer ini.

Dari uraian yang ada, kemudian dapat dipahami bahwa adanya pangkalan militer K-2 Airbase tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework, sebab walaupun telah dimulai sejak sebelum 2002, secara resmi perjanjian inilah yang mengantarkan keduanya kepada kerja sama yang lebih dalam termasuk terkait pangkalan militer K-2 tersebut.

Secara umum, prinsip perjanjian strategis ini didasarkan atas hubungan saling menguntungkan yang menjunjung tinggi demokratisasi dan reformasi ekonomi; keamanan regional; kemerdekaan, integritas wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan sebagai kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan politik, sosial serta stabilitas ekonomi, kemakmuran dan keamanan nasional. Kemudian menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah demi menjamin stabilitas regional khususnya di kawasan Asia tengah, berpegang pada tujuan bersama, termasuk melawan segala bentuk manifestasi serta dukungan terhadap

ekstrimisme dan terorisme; serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar United Nations Charter, Helsinki Final Act yang dimiliki oleh Organization for Security and Cooperation in Europe sebagaimana *rule of law* yang berlaku serta dalam UN dan OSCE Documents.

Secara spesifik, sesuai dengan isi yang tertuang pada dokumen resmi perjanjian Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation Framework between The United States of America and Republic of Uzbekistan<sup>14</sup>, pokok-pokok perjanjian strategis ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a.) Aspek Politik

Berdasarkan prinsip norma-norma internasional, kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, *non-interference*, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan, kedua belah pihak bersepakat dalam rangka antara lain mengintensifkan transformasi demokrasi rakyat dalam berbagai aspek dari pihak Uzbekistan, sebaliknya dari pihak Amerika Serikat dengan cara berusaha untuk terus memberikan bantuan, nasehat, dan pendampingan sesuai ketentuan hukum Amerika Serikat yang berlaku terhadap Uzbekistan demi kemajuan nyata antara lain pada: kekuatan dasar negara sekuler yang berdasar pada *rule of law*, *market-based economy* dan *effective social safety net*, serta membangun masyarakat sipil yang

---

<sup>14</sup>US Department of State. (2002, July 8). *Archive*. Diakses pada January 9, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/2002/11711.htm#>

terbuka dan kuat; meningkatkan peran institusi demokratis dan politis demi memperkuat penanaman nilai-nilai demokratis dalam masyarakat, mewujudkan sistem multi partai yang murni; penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia, membangun struktur non-pemerintahan termasuk media independen yang aktif; memastikan implementasi prinsip konstitusional atar pembagian kekuasaan, mengembangkan proses pembuatan hukum; meningkatkan sistem hukum yang berlaku; serta meningkatkan aktivitas dari perwakilan eksekutif dan administratif. Perjanjian pada aspek politik ini termasuk pada kerangka program individual dan perjanjian<sup>15</sup>.

Maka kemudian, di antara kedua belah pihak yang bersepakat terutama Uzbekistan dalam hal ini sebagai negara baru merdeka yang dirasa membutuhkan kontrol atas stabilisasi negaranya harus melaksanakan poin-poin perjanjian di atas sebagai bagian dari agendanya demi terlaksananya pembangunan. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah melalui bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk terlaksananya pemerintahan di Uzbekistan khususnya melalui pembiayaan yang pada tahun fiskal 2002 diestimasikan secara total mencapai \$297.84 Juta<sup>16</sup>. Amerika Serikat disini utamanya mengharapkan bahwa pelaksanaan politik pemerintahan di

---

<sup>15</sup>US Department of State, *Ibid*

<sup>16</sup>US Department of State. (2003, Januari). *Country Assesment: Uzbekistan*. Diakses pada Mei 2017, dari US Department of State: <https://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23630.htm>

Uzbekistan telah sesuai dengan demokratisasi dan menganut sistem multipartai yang sebenarnya.

b.) Aspek Keamanan Militer dan Teknis-militer

Kerjasama pada aspek ini didasarkan atas kesadaran bahwa keamanan negara dalam lingkungan kawasan merupakan kunci untuk pembangunan, kesejahteraan dan stabilitas kawasan Asia Tengah, hal tersebut kemudian dapat tercapai salah satunya dengan terjalinnya hubungan kerjasama baru yang bersifat jangka panjang<sup>17</sup>.

Dalam aspek ini, Amerika Serikat akan secara tegas memperhatikan berbagai bentuk ancaman eksternal terhadap keamanan dan integritas wilayah Republik Uzbekistan, yang kemudian didukung secara kooperatif dari pihak Uzbekistan terutama terkait prosedural konsitusional negaranya, dalam rangka antara lain memerangi terorisme, *human trafficking*, *organized crime*, *money laundering*, perdagangan senjata, amunisi dan bahan peledak ilegal dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan *rule of law*, dengan berbagai cara seperti mengadakan konsultasi rutin, penguatan kerjasama kelembagaan hukum, pelatihan unit khusus militer dan pasukan perdamaian termasuk menyediakan kebutuhan logistik, penguatan terhadap wilayah

---

<sup>17</sup>US Department of State. (2002, July 8). *Archive*. Diakses pada January 9, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/2002/11711.htm#>.

perbatasan, serta penanggulangan bencana dan tanggap darurat demi tercapainya stabilitas dalam negeri<sup>18</sup>.

Terkait aspek ini, secara signifikan selain melalui pembangunan pangkalan militer di Karshi Khanabad (K2) Airbase, Amerika Serikat dan Uzbekistan melakukan kerja sama atas penyediaan sumber energi senjata pemusnah massal. Navoi Mining & Metallurgical Combinat (NMMC) adalah bagian dari Holding Company Uzbekistani Kyzylkumredmetzoloto, yang melakukan semua pertambangan uranium di dalam negeri, serta pertambangan emas dan kegiatan lainnya. Hingga pada tahun 1992, seluruh pasokan uranium yang ditambang dan digiling di Uzbekistan dikirim ke Rusia. Kemudian sejak tahun 1992, hampir semua produksi uranium Uzbekistani telah diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara lain melalui Nukem Inc. Sebanyak 128.700 tU telah diproduksi hingga akhir tahun 2011. Pada tahun 2015 produksi uranium Uzbekistan adalah sebanyak 2385 tU<sup>19</sup>. Bentuk kerja sama yang dilakukan pada aspek ini adalah terutama dalam hal kelanjutan Uzbekistan sebagai negara pengeksport uranium terbesar bagi Amerika Serikat, yang telah diperkuat juga dengan adanya kesepakatan atas fasilitasi nonproliferasi nuklir diantara kedua negara. Selain itu, Amerika

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>World Nuclear Association. (2017, Mei). *Uranium in Uzbekistan*. Diakses pada Mei 2017, dari World Nuclear Association: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/uzbekistan.aspx>

Serikat juga memberikan bantuan sebesar \$ 36,21 juta untuk Pembiayaan Militer Asing (FMF), termasuk FMF tambahan 25 juta dolar untuk Emergency Response Fund (ERF) dan \$ 11,00 juta di FMF Darurat<sup>20</sup>.

Dari sini terlihat, bahwa selain memiliki akses atas wilayah Uzbekistan terutama secara militer, didukung oleh kekuatan Amerika Serikat berkat bantuan yang diberikannya, Uzbekistan juga menyediakan sumber energi nuklir yang telah diperkuat dengan adanya perjanjian nonproliferasi nuklir antara keduanya sehingga mendukung posisi Amerika Serikat yang dapat semakin strategis di Uzbekistan dan di kawasan Asia tengah. Berdasarkan pemikiran neoimperialis, tentu saja hal ini akan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat terutama dalam jangka panjang.

#### c.) Aspek Ekonomi

Dalam rangka mendukung terwujudnya *market-based economy* di Uzbekistan dan integrasinya di dalam sistem ekonomi dunia, kedua belah pihak berencana untuk menjadikan aspek ekonomi sebagai prioritas dalam kerjasama bilateral ini. Fokus hubungan pada aspek ini adalah pada komitmen Uzbekistan dalam implementasi reformasi ekonomi secara makro, finansial, dan struktural yang bertujuan pada liberalisasi ekonomi, peningkatan nilai

---

<sup>20</sup>US Department of State. (2003, Januari). *Country Assesment: Uzbekistan*. Diakses pada Mei 2017, dari US Department of State: <https://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23630.htm>



tukar uang, daya saing internasional serta pembangunan sektor-sektor swasta<sup>21</sup>.

Secara teknis, usaha-usaha yang dilakukan dalam aspek ekonomi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan khususnya dari pihak Uzbekistan, antara lain meliputi reformasi terhadap berbagai sektor negara di Uzbekistan meliputi keuangan, investasi, pertanian, pembangunan sektor swasta, dan memastikan negaranya berpartisipasi aktif negara Uzbekistan di dalam IMF serta organisasi keuangan internasional lainnya. Sebaliknya, dari pihak Amerika Serikat menjamin penyediaan prioritas dan pendampingan serta bantuan yang bersifat jangka panjang dalam rangka implementasi reformasi ekonomi Uzbekistan, dalam bentuk promosi atas program-program bilateral yang sesuai dengan Uzbekistan, serta memberikan support terhadap Uzbekistan di dalam dialog-dialognya dengan lembaga keuangan internasional. Selain itu, kedua belah pihak secara bersama-sama mengembangkan dan memperluas *WTO-consistent trade* dan kerjasama investasi dengan memperluas lingkup pendampingan berdasarkan prinsip ekonomi pemerintahan Amerika Serikat misalnya terkait partisipasi bank dalam proyek investasi, memperkenalkan standar internasional atas kualitas dan sertifikasi produk ekspor, serta pembangunan teknologi hemat energi;

---

<sup>21</sup>US Department of State, US Department of State. (2002, July 8). *Archive*. Diakses pada January 9, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/2002/11711.htm#>

mendorong pembangunan aktivitas sektor swasta; membangun terciptanya kondisi ideal di Uzbekistan yang dapat menarik investasi luar negeri, memfasilitasi penggunaan program-program investasi lainnya serta membantu pembangunan perusahaan-perusahaan swasta skala kecil hingga menengah dan juga infrastruktur pariwisata internasional; serta memperluas akses timbal-balik baik berupa barang, tenaga kerja maupun jasa dan pemberian bantuan pemerintah yang tepat terkait akses Republik Uzbekistan di dalam WTO. Selanjutnya, kedua belah pihak juga memastikan tujuannya terkait intensifikasi kerjasama regional di kawasan Asia Tengah terkait masalah-masalah seperti pembangunan yang komprehensif atas hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan tersebut; formulasi bentuk dan mekanisme yang efektif untuk implementasi perjanjian terkait perluasan perdagangan timbal balik dan investasi antar negara baik di dalam maupun luar kawasan, termasuk penerapan prinsip-prinsip tarif sesuai aturan WTO; hubungan saling menguntungkan dan efisien atas penggunaan baik sumber daya alam, energi maupun transportasi; hingga pada pemberantasan kejahatan regional dan transnasional terutama perdagangan narkoba, organized crime, human trafficking, dan terorisme melalui penegakan hukum kerjasama antar negara-negara kawasan dan sekitarnya<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>US Department of State, *Ibid*

Aspek ini menjadi sangat penting mengingat analisis yang dilakukan adalah terkait neoimperialisme. Sebagai bentuk perluasan kekuasaan Amerika Serikat pada aspek ekonomi di Uzbekistan, diberikan fasilitas berupa bantuan sebesar \$55 juta penjaminan kredit jangka menengah untuk mendukung pembelian barang dan jasa Amerika Serikat oleh perusahaan skala kecil dan menengah milik Uzbekistan<sup>23</sup>. Hal ini akan sangat menguntungkan secara ekonomi, terutama melalui perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Uzbekistan. Bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan tersebut, secara tidak langsung Uzbekistan didorong untuk mau tidak mau agar menjadi konsumen terhadap penyedia barang dan jasa Amerika Serikat yang ada di negaranya. Memberi, untuk kemudian dapat mendulang keuntungan yang lebih besar.

#### d.) Aspek Kemanusiaan dan Sumber Daya Manusia

Kerjasama pada aspek ini meliputi berbagai bidang dalam aspek kemanusiaan, antara lain: bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan pelatihan khusus, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan atas lingkungan dengan cara menyediakan bantuan-bantuan kesehatan terutama pada zona-zona environmental distress di Uzbekistan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang;

---

<sup>23</sup>US Department of State. (2002, Maret). *Archive*. Diakses pada April 24, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/8735.htm>

kemudian kedua negara juga mengharapkan kerja sama aktif dalam bidang keilmuan dan humaniora serta bidang teknologi tinggi untuk tercapainya keuntungan bersama yang signifikan, dengan cara kerjasama antar asosiasi dan institusi keilmuan, mengadakan pelatihan khusus terkait sains dan teknologi yang diprioritaskan pada Uzbekistan, penetapan ketentuan teknis dan finansial dari Amerika Serikat dalam rangka mendukung pembangunan sistem keilmuan Uzbekistan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Amerika Serikat; selanjutnya kedua belah pihak juga bersepakat atas adanya kerjasama aktif terkait hak asasi manusia, hak-hak kebebasan dasar manusia untuk mendukung usaha demokratisasi yang sesuai dengan hukum internasional dan nasional; serta kesepakatan kedua negara dalam hal peningkatan kualitas di bidang informasi yang meliputi media massa dan pers termasuk media massa non-pemerintah<sup>24</sup>.

#### e.) Aspek Hukum

Terkait aspek ini, kedua negara menyadari bahwa pandangan yang sama mengenai kebutuhan Uzbekistan demi tercapainya negara demokratis yang sesuai dengan *rule of law* dan norma internasional, sehingga kemudian dibutuhkan perwujudan dari pelaksanaan sistem pemerintahan sesuai hukum, dan sistem peradilan, serta sosialisasi terhadap masyarakat mengenai budaya

---

<sup>24</sup>US Department of State, *Ibid*

hukum dan juga pelatihan untuk para calon ahli hukum; selanjutnya kedua negara bersepakat untuk mengembangkan sistem perundang-undangan Uzbekistan sehingga lebih sesuai dengan sistem hukum internasional meliputi perlindungan atas hak asasi manusia, demokratisasi dan liberalisasi, peningkatan aktivitas peradilan dan juga kebebasan hakim; serta kesepakatan kedua negara terkait peningkatan kualitas dan aktivitas badan penegak hukum negara<sup>25</sup>.

Dari poin-poin aspek kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara, pada intinya adalah bahwa secara umum, Amerika Serikat menghargai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Uzbek terutama untuk dapat menerapkan reformasi pada hampir segala aspek dalam pelaksanaan pemerintahan di negaranya, dengan adanya berbagai pendampingan khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip Amerika Serikat. Ini tertuang pada masing-masing aspek kerjasama serta diulangi di tiap-tiap sub-sub poinnya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa proyek kerjasama besar ini sangat berpotensi untuk dapat semakin melebar dan mendalam untuk skala jangka panjang. Tentu saja, dengan ketidaksetaraan posisi keduanya bahwa antara Amerika Serikat yang besar dan Uzbekistan sebagai negara baru merdeka dengan latar belakang neoimperialis Amerika Serikat didukung oleh posisi strategis Uzbekistan, maka dapat dikatakan bahwa disepakatinya perjanjian kerjasama strategis ini merupakan manifestasi politik Amerika Serikat yang

---

<sup>25</sup>US Department of State, *Ibid*

mengarah kepada kecenderungan ambisi neoimperialismenya di Republik Uzbekistan dan lebih lanjut secara regional di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya.

Di dalam perjalanannya, Uzbekistan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut situs resmi Britanicca, Uzbekistan, dalam hal ini Islam Karimov sebagai presiden yang tengah berkuasa pada saat itu, memanfaatkan hubungannya dengan Amerika Serikat untuk dapat semakin menekan masyarakatnya. Pada tahun 2002, presiden Islam Karimov memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden hingga tahun 2007, yang tentu saja hal itu merupakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat, selain sudah pasti bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan sistem politik demokratis yang sesungguhnya tertuang di dalam perjanjian kerjasama.

Sejak tahun 2004, menurut Institute for Defence Studies and Analysis, sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya pada aspek politik, tercatat bahwa Amerika Serikat mulai mengurangi bantuan sebanyak 10,5 juta USD termasuk 6,8 juta USD bantuan militer, sebab Departemen Luar Negeri Uzbekistan tidak bisa menjamin terlaksananya sistem demokrasi multi partai di Uzbekistan<sup>26</sup>. Amerika juga mengkritik pelaksanaan politik pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia di Uzbekistan.

---

<sup>26</sup>Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA). (2005, Desember 25). *IDSA COMMENT*. Diakses pada Februari 25, 2017, dari IDSA: [http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/RussiaandUzbekistanSignTreatyofAllianceRelations\\_jbaksh\\_i\\_271205](http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/RussiaandUzbekistanSignTreatyofAllianceRelations_jbaksh_i_271205)

Pada perkembangannya, tekanan Amerika Serikat terhadap Uzbekistan kian semakin kuat. Di sisi lain, Rusia juga semakin menunjukkan perhatian khususnya terhadap hubungan Amerika Serikat dan Uzbekistan, yang dirasa sebagai langkah untuk menyebarkan pengaruh barat dan semakin agresif dari waktu ke waktu dalam memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, di tahun 2004 hubungan Rusia dan Uzbekistan mulai intensif ditandai dengan disepakatinya perjanjian strategis yang mana posisinya saat itu, Uzbekistan masih menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Tentu saja hal tersebut semakin mempengaruhi keretakan hubungan di antara keduanya, dengan kata lain pihak Amerika Serikat terancam untuk kehilangan kesempatan dalam posisinya untuk terus melancarkan pengaruh di kawasan Uzbekistan dan sekitarnya, termasuk terkait akses penuh militer atas wilayah Afganistan.

Tidak sampai di situ saja, keretakan hubungan Amerika Serikat dan Uzbekistan akhirnya mencapai puncaknya pasca kejadian yang cukup menyita perhatian dunia terjadi di Kota Andijan, Uzbekistan pada 13 Mei 2005, dimana pasukan Uzbekistan menyerang para demonstran di kota tersebut. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal sebagai peristiwa Andijan Massacre, yang mana berdasarkan berbagai laporan yang ada, saat itu telah menewaskan masyarakat sipil dalam jumlah yang besar. Menurut Human Right Watch, korban berjumlah sebanyak ±700 orang termasuk wanita dan anak-anak, sedangkan berdasarkan klaim dari elit Uzbekistan bahwa jumlah tewas adalah sebanyak 187 orang dan pelakunya adalah para ekstrimis

islam dengan andil dukungan dari pihak barat. Sementara itu, Amerika segera membentuk tim investigasi independen terkait kasus tersebut. Tentu saja, posisi Amerika Serikat yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia adalah pada pihak yang memberikan kritik keras terhadap elit Uzbekistan pada saat itu yang diklaim melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Tragedi ini berawal dari adanya penangkapan 23 orang pengusaha terkenal oleh pemerintah Uzbekistan atas tuduhan ekstrimisme pada tanggal 12 Mei 2005, yang kemudian menyebabkan dilakukannya demonstrasi oleh sekitar 1000 orang masyarakat sipil pada pusat pemerintahan di kota Andijan yang terletak di sebelah timur Uzbekistan. Mereka menuntut penjelasan langsung dari Presiden Islam Karimov terkait penangkapan tersebut, serta adanya tuduhan tindak korupsi yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Human Right Watch, kekacauan dimulai dari tembakan yang menyerang bangunan pemerintahan, yang kemudian direspon oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Islam Karimov dengan pasukan militer yang menyerang para warga sipil yang melakukan demonstrasi.

Tepatnya setelah terjadinya tragedi Andijan Massacre tersebut, pada bulan Juni 2005, Presiden Uzbekistan Islam Karimov mulai melakukan pembatasan terhadap operasi militer Amerika Serikat di K-2 Airbase sebagai respon atas kritik keras Amerika Serikat terhadap tragedi penembakan tersebut. Selain melarang adanya operasi militer pada malam hari, elit Uzbekistan juga menetapkan batas-batas



terhadap transportasi berat yang beroperasi di pangkalan tersebut. sebagai respon, Amerika Serikat kemudian memindahkan beberapa operasi dari K-2 ke Pangkalan Udara Bagram di Afghanistan, dan mengarahkan kembali penerbangan kargo berat melalui Pangkalan Udara Manas di Kyrgystan. Saat itu pihak Uzbekistan juga telah mengeluhkan terkait kerusakan landasan pacu pesawat terbang yang diakibatkan oleh pesawat kargo berat yang mana Amerika Serikat tidak dapat memperbaiki kerusakan tersebut<sup>27</sup>.

Pada tanggal 29 Juli 2005 Uzbekistan memberikan waktu 180 hari bagi Amerika Serikat untuk mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad, sebagai bentuk penolakan elit Uzbekistan terhadap kritik barat dan tuntutan penyelidikan internasional. Mengingat juga bahwa sejak awal disepakatinya perjanjian antara kedua pihak, Uzbekistan belum dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai yang tertuang di dalam dokumen kerjasama yang ada sehingga menjadikan Amerika Serikat banyak mengkritik pelaksanaan pemerintahannya.

Secara umum, berdasarkan uraian pada bab ini dapat dikatakan bahwa kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Republik uzbekistan sebagai negara baru merdeka yang memiliki posisi strategis tersebut, dengan motivasi awal sebagai langkah penjaminan atas stabilisasi dan keamanan kawasan melalui

---

<sup>27</sup>Globalsecurity.org. (2011, September). *Karshi-Khanabad (K-2) Air Base Camp Stronghold Freedom Khanabad, Uzbekistan*. Diakses pada April 25, 2017, dari Globalsecurity.org: <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad-ops.htm>

pengamanan dan teknik militer, telah mengalami kegagalan sebab pihak Amerika Serikat tidak dapat melanjutkannya, dan pihak Uzbekistan justru berpindah haluan kerjasama ke arah Rusia. Maka Amerika telah kehilangan kesempatan terhadap daerah strategis mantan jajahan Soviet dengan jumlah penduduk terbanyak tersebut. Pada bab selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai kesadaran elit Uzbekistan terhadap ambisi neoimperialis Amerika Serikat melalui kerja sama strategis yang terjalin dengan negaranya.